LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, telah disusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik pada Instansi Pemerintah sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi guna meningkatkan layanan tersebut, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Survey ini dilakukan dengan membagikan kuesioner pada masyarakat dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 April 2023

Ketua Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus

Saut Maruli Tua Pasaribu, SH.,MH.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBR dan WBBM), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Kuesioner Survei

- a) tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan
- b) tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan
- c) tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan
- d) tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan
- e) tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan

BAB II

METODOLOGI

2.1. Kriteria Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.2. Metode Pencacahan

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.3. Metode Pengolahan Data Dan Analisis

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

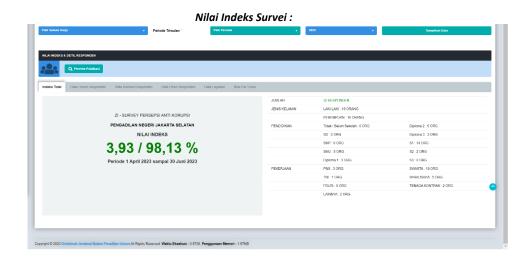
BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

3.1. Analisis Hasil Survei

Berikut hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilaksanakan pada tanggal 10,11,12 dan 13 April 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus.





Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan terdapat 30 responden yang telah mengisi survey dengan hasil nilai indek sebesar 3,93 / 98,13 %.

BAB IV

DATA SURVEI

4.1. Data Responden

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

| | Nama/Kode Responden | Pelayanan | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | Waktu Rekam | Aksi |
|----|--|---------------------------------|----|----|----|----|----|---|------|
| 1 | Dessy Ismayati PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 858900019576 | Layanan Pidana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 15:25:14 WIB | |
| 2 | Nathasya Anggia F PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 81280199910 | Layanan Pidana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 15:14:38 WIB | |
| 3 | NOVIARDI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 81297244074 | Layanan Pidana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 15:04:50 WIB | |
| 4 | Thariqa Zahra PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 81295956264 | Layanan Hukum / Informasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 15:01:37 WIB | |
| 5 | Lisa Wulandari PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 85885236375 | Layanan Administrasi Umum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 14:57:41 WIB | |
| 6 | Stephani PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 81398083704 | Layanan Perdata | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 14:56:00 WIB | |
| 7 | MARIA LUCIANA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 8129210445 | Layanan Administrasi Umum | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 14:42:09 WIB | |
| 8 | Clarita PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 8121051275 | Layanan Administrasi Umum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 14:36:58 WIB | |
| 9 | Arsya PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 81514768246 | Layanan Administrasi Umum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 14:33:01 WIB | |
| 10 | Yusuf Berlin PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 81294392083 | Layanan Perdata | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 14:28:54 WIB | |
| 11 | Linda M PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 81296568151 | Layanan Hukum / Informasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 14:21:03 WIB | |
| 12 | Pandu PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 8111075850 | Layanan Hukum / Informasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 14:11:14 WIB | |
| 13 | Ari Frita PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 81276286110 | Layanan Perdata | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 14:07:34 WIB | |
| 14 | SLAMET PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 83831767354 | Layanan Hukum / Informasi | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 13:48:52 WIB | |
| 15 | Elizabeth PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 81387567891 | Layanan Pidana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 13:48:37 WIB | |
| 16 | Jhefry Khasogi PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 85216548929 | Layanan Perdata | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 13:43:38 WIB | |
| 17 | CHRISTINA NATALIA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 89626685255 | Layanan Pidana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 13:40:02 WIB | |
| 18 | Dian Kusuma PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN | Layanan Hukum / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 | |

| | Nama/Kode Responden | Pelayanan | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | Waktu Rekam | Aksi |
|----|---|---------------------------------|----|----|----|----|----|--|------|
| | No. HP 81393666193 | Informasi | | | | | | 13:33:33 WIB | |
| 19 | ENDANG SULISTIOWATI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 81276706076 | Layanan Perdata | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 11:55:12 WIB | |
| 20 | VIDYATAMA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 85963159410 | Layanan Perdata | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 11:41:04 WIB | |
| 21 | Prabowo Rizky PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 82110065901 | Layanan Hukum / Informasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 11:39:55 WIB | |
| 22 | M. RAFFI ATHALLAH M PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 8112648280 | Layanan Perdata | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 10:50:57 WIB | |
| 23 | Siti Khodijah PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 8128858098 | Layanan Administrasi Umum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 10:09:48 WIB | |
| 24 | Muhammad Fadel PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 81947701015 | Layanan Perdata | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 09:51:17 WIB | |
| 25 | ABDUL PANI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 89630348285 | Layanan Perdata | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kamis, 13 April 2023 09:47:44 WIB | |
| 26 | ADDI PRATAMA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 87749999968 | Layanan Perdata | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Selasa, 11 April 2023 11:39:08 WIB | |
| 27 | Anonim PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 81284487432 | Layanan e- Court | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Selasa, 11 April 2023 10:43:54 WIB | |
| 28 | Popit Yulianti PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 85697076707 | Layanan Administrasi Umum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Selasa, 11 April 2023 10:09:47 WIB | |
| 29 | Anggraini Kartika Puteri PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 83804393911 | Layanan Hukum / Informasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Selasa, 11 April 2023 09:57:37 WIB | |
| 30 | Anonim PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 87837146070 | Layanan Hukum / Informasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Selasa, 11 April 2023 09:32:08 WIB | |
| 31 | Ade Prayoga PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 08111314020 | Layanan Administrasi Umum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Selasa, 11 April 2023 09:16:21 WIB | |
| 32 | Daniel PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. HP 081290622135 | Layanan e- Court | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Selasa, 11 April 2023 09:03:13 WIB | |